

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kasus narkoba dewasa ini semakin meningkat dan menjadi permasalahan serius yang merambah pada semua kalangan masyarakat di Indonesia. Saat ini narkoba menjadi barang yang mudah didapat, korbannya tidak hanya terdiri dari kalangan tertentu saja, namun juga semua kalangan dalam masyarakat.

Narkoba adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan dampak tertentu bagi penggunaannya. Istilah narkoba yang dipergunakan disini bukanlah sekedar *narcotics*, namun secara *farmacologie* (farmasi) sama artinya dengan *drug* yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia dan pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa : penenang, perangsang (bukan rangsangan seks) menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).<sup>1</sup>

Narkoba dapat menjadi suatu zat berbahaya yang menimbulkan efek negatif terhadap penggunaannya apabila diperuntukkan tidak sesuai standar aturannya. Di satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang

---

<sup>1</sup> Aulia Fadhli, *Napza Ancaman, Bahaya, Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*, Gava Media, Yogyakarta, 2018, Hal. 24

bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat.<sup>2</sup> Adanya kebutuhan pengawasan untuk menindak lanjuti kasus narkoba menjadi latar belakang lahirnya Peraturan Perundang-Undangan tentang Narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, terhadap pengguna narkoba dapat dibedakan menjadi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba. Penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Namun jika orang tersebut merupakan pecandu narkoba, ia merupakan orang yang menggunakan dan menyalahgunakan narkoba secara ketergantungan baik secara fisik maupun psikisnya. Dimana penyalahguna dan pecandu narkoba memiliki unsur kesengajaan dalam perbuatannya. Hal ini tentu saja berbeda dengan kualifikasi orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Pengertian Korban Penyalahgunaan Narkoba sendiri merujuk terhadap penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa “korban penyalahgunaan narkoba adalah orang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba”. Dengan demikian korban penyalahgunaan narkoba ini tidak memiliki unsur kesengajaan

---

<sup>2</sup> Redaksi Nuansa Aulia, *Narkoba dan Psikotropika*, Nuansa Aulia, Bandung, 2001, Hal. 4

dalam mempergunakan narkoba. Dimana orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba ini menggunakan narkoba karena suatu keadaan tertentu membuatnya menggunakan narkoba yang tidak didasarkan niat dan keinginannya, sehingga ia disebut sebagai korban.

Seorang korban penyalahgunaan narkoba harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkoba secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan narkoba atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkoba (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya).<sup>3</sup>

Dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan narkoba tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi pidana saja, namun dibutuhkan juga tindakan lainnya agar tidak hanya berupa hukuman saja tetapi juga dapat memperbaiki dan memulihkan keadaan pelaku atau korban agar tidak terjerumus kembali kepada narkoba. Salah satu bentuk tindakan lainnya tersebut adalah dengan melakukan upaya rehabilitasi. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>4</sup>

Merujuk Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkoba pada dasarnya telah memberikan ketentuan yang menjadi jaminan terhadap pengaturan upaya rehabilitasi baik berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi

---

<sup>3</sup> <https://www.kompasiana.com/hakamain.com/54f6eb1aa333114e708b462f/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkoba-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkoba>, Diakses Pada Tanggal 27 April 2020 Pukul 17.00

<sup>4</sup> Sutarmo Setadji, *Awas! Jangan Coba-coba Menjadi Pengguna Narkoba Berbahaya!*, Jakarta: UI-Pers, 2006, Hal.2

sosial. Ketentuan ini juga dipertegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Adanya tindakan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan tersebut hadir guna melindungi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan maksud memberikan kesempatan kepada mereka untuk pulih dan siap kembali ke dalam kehidupannya dalam bermasyarakat.

Namun kebijakan untuk menempatkan korban pengguna narkoba ditempat rehabilitasi tidak dapat berjalan secara baik karena masih terbentur dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika yang dalam hal ini korban pengguna narkoba sampai sekarang ini masih diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, akibatnya mereka tidak memperoleh perawatan dan pemulihan secara maksimal karena harus mendekam didalam penjara.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang menjadi pegangan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam memutus perkara. Selain itu, pada tahun 2011 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, memberikan jaminan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis

---

<sup>5</sup> Parasian Simanungkalit Dewan, *Model Pidanaan yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia*, Jurnal Yustisia, Vol.1 No. 3 , 2012, Hal. 81



dan rehabilitasi sosial. Kedua peraturan tersebut merupakan langkah maju dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pecandu narkoba. Penerapan hukuman pidana (penjara) bagi korban pengguna narkoba di Indonesia terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna, bahkan setiap tahunnya mengalami peningkatan.<sup>6</sup>

Tindakan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika ditetapkan berdasarkan kewenangan hakim sebagaimana yang diatur pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana apabila seseorang telah terbukti tidak bersalah dan hanyalah sebagai Korban Penyalahguna Narkotika maka ia berhak untuk mendapatkan rehabilitasi.

Dalam menangani kasus narkotika, salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting terhadap kasus tindak pidana narkotika adalah Penyidik. Dalam hal ini penyidik POLRI diharapkan dapat membantu penyelesaian kasus narkotika. Wewenang penyidik POLRI ini tercantum dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta secara umum mengenai penyidikan yang dilakukan oleh POLRI dimuat dalam Pasal 7 KUHAP dan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Salah satu kota yang terus mengalami peningkatan terhadap kasus Narkotika adalah Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi merupakan kota wisata yang selalu dikunjungi wisatawan baik wisatawan lokal maupun

---

<sup>6</sup>*Ibid*, Hal. 81

internasional. Kota wisata yang sedang tumbuh ini tentunya mengalami perkembangan dan pengaruh setiap waktunya akibat masuknya budaya luar terhadap masyarakat lokalnya, sehingga pengaruh narkoba di Bukittinggi tidak bisa dihindari. Hal ini terbukti dengan kasus narkoba yang terus mengalami peningkatan di Kota Bukittinggi.

Pada tahun 2019, terhitung sebanyak 70 kasus dengan 93 orang tersangka penyalahgunaan narkoba diungkap Polres Bukittinggi. Sementara di tahun 2018, kasus yang ditangani Polres Kota Bukittinggi hanya 61 kasus. Dilihat dari jumlah tersangka yang berhasil diringkus, Kapolres Bukittinggi mengatakan bahwa 91 laki-laki dan dua perempuan. Dengan 43 kasus tercatat di Kota Bukittinggi, serta 27 kasus di Kabupaten Agam bagian timur.<sup>7</sup> Dari data tersebut telah menunjukkan bahwa jumlah kasus narkoba yang terungkap di Bukittinggi cenderung mengalami peningkatan.

Sementara itu, terhadap kasus korban penyalahgunaan narkoba pada tahun 2017 dan tahun 2018, hanya tercatat 10 korban penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya di Bukittinggi yang menjalani proses rehabilitasi sosial rawat inap di Lembaga New Padoe Jiwa Bukittinggi. Korban penyalahgunaan narkoba yang direhabilitasi di Lembaga New Padoe Jiwa Bukittinggi tersebut merupakan korban penyalahgunaan narkoba yang telah memenuhi persyaratan yang dibuktikan dengan tes urine positif dan minimal ada riwayat penggunaan dalam satu tahun terakhir berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit/institute pemerintah atau

---

<sup>7</sup> <https://langgam.id/2019-polres-bukittinggi-ungkap-70-kasus-penyalahgunaan-narkoba/>, Diakses Pada Tanggal 12 April 2020 Pukul 14.50

swasta.<sup>8</sup> Dengan demikian dapat diketahui bahwa kasus korban penyalahgunaan narkoba di Bukittinggi yang berhasil sampai pada proses rehabilitasi tidak sebanding dengan tingginya jumlah peningkatan kasus narkoba di Bukittinggi.

Banyaknya temuan yang didapat sudah membuktikan bahwa kasus narkoba di Bukittinggi sangat memprihatinkan, sebab kasus terbesar adalah kasus narkoba. Bahkan Kepala BNK Bukittinggi juga menyampaikan ada korban narkoba di daerah Bukittinggi yang direhabilitasi sampai ke Lido.<sup>9</sup> Perlunya perhatian terhadap penanganan korban penyalahguna narkoba ini, maka diharapkan penyidik sebagai aparat kepolisian yang memiliki kewenangan dalam penanganan perkara narkoba mampu untuk mengupayakan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkoba, sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Narkotika dan ketentuan pada PERMA Nomor 01/MA/PB/III/2014 bahwa untuk mendapatkan rehabilitasi haruslah mendapatkan rekomendasi dari penyidik kepada tim asesmen terpadu.

Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Penerapan Rehabilitasi Medis dan Sosial oleh Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>8</sup> Iqbal Nuril Hakim, Skripsi “*Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga New Padoe Jiwa Bukittinggi*”, Padang, Universitas Andalas, 2019, Hal. 49

<sup>9</sup> <https://www.harianhaluan.com/news/detail/76408/kejari-bukittinggi-musnahkan-bb-narkoba-dan-senjata-rakitan>, Diakses Pada Tanggal 13 April 2020 Jam 19.10

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan rehabilitasi medis dan sosial oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi terhadap korban penyalahgunaan narkotika?
2. Apa saja kendala yang ditemui Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi dalam menerapkan rehabilitasi medis dan sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan rehabilitasi medis dan sosial oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi terhadap korban penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam menerapkan rehabilitasi medis dan sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan, maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis



- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pemikiran sekaligus sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya terhadap penerapan rehabilitasi medis dan sosial oleh penyidik terhadap korban penyalahgunaan narkoba.
- b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah dan tedepan di Fakultas Hukum Universitas Andalas sekaligus bermanfaat bagi Aparat Penegak Hukum, Mahasiswa, Peneliti dan orang-orang yang ingin memahami penerapan rehabilitasi medis dan sosial oleh penyidik terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

## E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial

yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variable (independent variable) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (socio-legal research).<sup>10</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan menjelaskan seteliti mungkin agar dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu :

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang didapat dari sumber di lapangan. Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dengan wawancara secara langsung langsung dengan pihak penyidik di Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah jadi yang bisa ditemukan melalui studi kepustakaan.

Data sekunder terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>10</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, Hal. 133

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, berupa :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika
7. PERMA Nomor 01/MA/PB/III/2014
8. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/501/2015 Tahun 2015 tentang Institusi Penerima Wajib Lapori
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban

Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang erat kaitannya dengan penelitian, berupa buku-buku literatur, jurnal, artikel, karya ilmiah dan makalah-makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung yang digunakan penulis untuk memperjelas arti dari istilah dari bahan yang diperoleh, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia dan bahan hukum lainnya yang diambil dari *Website*.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan dan pengumpulan data yang didapat di lapangan berupa berkas kasus, laporan dan dokumen hukum lainnya di Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi.

b. Wawancara



Wawancara adalah pengumpulan data dengan melakukan komunikasi dan menanyakan secara langsung atau tatap muka untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Aleyxi Aubedillah, SH Kasat Reserse Narkoba Polres Bukittinggi dan Jamalus, SH sebagai salah satu penyidik yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi terkait cara mengatasi masalah yang diangkat peneliti yaitu mengenai penerapan rehabilitasi medis dan sosial oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Setelah semua data diperoleh, kemudian dilakukan pengolahan data melalui proses *Editing*, yaitu semua data yang telah diperoleh akan diperiksa dan dipilih data yang sesuai dengan yang diperlukan, yang bertujuan agar diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang dapat dipertanggung jawabkan.

### b. Analisis data

Berdasarkan data yang diperoleh dilakukan analisis secara kualitatif dimana data primer dan data sekunder yang diperoleh

kemudian dilakukan analisis dengan mengumpulkan, mengelompokkan dan membandingkannya berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh data secara menyeluruh tentang kenyataan yang sebenarnya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

